

ABSTRAK

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi tambang jenis batuan berupa pasir besi, yang akhirnya dijadikan masyarakat lokal sebagai salah satu mata pencaharian. Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan perizinan mengakibatkan lemahnya pengawasan oleh pemerintah daerah. Permasalahan dalam skripsi adalah: (1) Apakah sanksi pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap pelaku pertambangan liar/*illegal mining* galian tipe C ?

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*). sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini bahwa Pelaku pertambangan di Kabupaten Lumajang telah melakukan pelanggaran izin pertambangan dimana pelaku pertambangan galian C tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pertambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang tersebut adalah *illegal* dan dalam kasus Lumajang ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Puluhan milyar yang dilakukan oleh warga negara asing Lam Chong San dalam Putusan NOMOR 1219 K/PID.SUS/2017 yang ditangani oleh Kepolisian lumajang dimana berdasarkan aturan undang-undang korupsi jika terdapat korupsi dengan nilai kerugian diatas satu milyar yang harus menangani adalah KPK. Jadi untuk penerapan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi tidak di tegakkan.

Kata kunci: Izin, Korupsi, Pertambangan *illegal*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	14
1.6.3 Bahan Hukum	14
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	16
 BAB II PERIZINAN PERTAMBANGAN GALIAN C DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	 17
2.1 Perizinan Pertambangan Galian C Atau Batuan	17
2.2 Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.3 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 94/PID. SUS/TPK/ 2016/PN.SBY	38
 BAB III PENERAPAN UU NOMOR 31 TAHUN 1999 TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN GALIAN C BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 94/PID.SUS/TPK/2016/PN.SBY	 41
3.1. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya Dalam Memutus Perkara Nomor 94/PID.SUS/TPK/ 2016/PN.SBY	41
3.1.1.Dampak Korupsi Terhadap Lingkungan Dan Perekonomian Negara ...	52
3.1.2.Pelanggaran Pelaku Pertambangan Galian C Terhadap Kasus Pertambangan <i>Illegal</i> Pasir Hitam Di Kabupaten Lumajang	56
3.2. Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	62

3.3. Lembaga Penegak Hukum Yang Menangani Kasus Korupsi Berdasarkan Teori Kewenangan.....	63
---	----

BAB IV PENUTUP 68

4.1. Kesimpulan	68
-----------------------	----

4.2. Saran.....	69
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA.....71

BIODATA PENULIS.....74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian dan Korelasinya	10
---	----